



E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://epaper.dpr.go.id>

Judul : Dunia Masih Tidak Siap Hadapi Pandemi
Tanggal : Senin, 07 Februari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 8

KESEHATAN

Dunia Masih Tidak

Siap Hadapi Pandemi

JAKARTA, KOMPAS — Merebaknya Covid-19 menunjukkan bahwa sistem kesehatan saat ini tidak siap menangani pandemi. Pembenahan sistem kesehatan diperlukan, seperti mengencangkan surveilans penyakit, menyiapkan platform untuk menjaga pasokan obat dan alat kesehatan, serta mengonsolidasi sistem kesehatan tingkat nasional.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Tjandra Yoga Aditama, mengatakan bahwa dunia sebenarnya telah bersiap menghadapi kemungkinan pandemi sejak satu dekade lalu. Kesadaran untuk bersiap timbul setelah pandemi flu babi akibat virus H1N1.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan flu babi sebagai pandemi pada Juni 2009. Status pandemi berakhir pada Agustus 2010. Ada 74 negara yang melaporkan kasus infeksi flu babi.

H1N1 pertama kali dideteksi di Meksiko. Kasus pertama dicurigai berasal dari sebuah peternakan babi di Negara Bagian Oaxaca. Namun, titik asal ataupun titik pasti penyebaran virus tidak diketahui (Kompas, 29/4/2009).

"Setelah pandemi H1N1, WHO membuat komite peninjauan tentang bagaimana dunia menghadapi pandemi. Kesimpulannya, dunia tidak siap. Karena itu, dunia mencoba bersiap sejak 2011," kata Tjandra pada Pertemuan Ilmiah Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi (Pipkra) Ke-19 secara daring, Sabtu (5/2/2022).

Kendati persiapan sudah berlangsung sekitar 10 tahun, dunia dinilai masih tidak siap saat ada pandemi Covid-19. Data WHO per 4 Februari memperlihatkan, ada lebih dari 386 juta kasus positif Covid-19 dan lebih dari 5,7 juta kematian.

Indeks Keamanan Kesehatan Global 2021 juga menunjukkan ketidaksiapan dunia dalam menghadapi pandemi dan epidemi di masa depan. Dari 195 negara, 115 negara belum mengalokasikan dana selama tiga tahun terakhir untuk menangani ancaman epidemi.

Adapun 126 negara belum menerbitkan dan menerapkan rencana tanggap darurat kesehatan nasional, khususnya untuk penyakit yang berpotensi epidemi atau pandemi. Sementara itu, hanya 33 negara yang rencana tanggap daruratnya mempertimbangkan populasi rentan.

Persiapan

Menurut Tjandra, para pakar kesehatan telah merumuskan beberapa hal yang bisa disiapkan untuk menghadapi pandemi ke depan. Pertama, kerja sama multisektor. Kedua, memperkuat independensi dan finansial WHO.

Ketiga, investasi dalam kesiapsiagaan masalah kesehatan. Keempat, surveilans dan pengumpulan data kesehatan secara terus-menerus yang diikuti respons. Kelima, menyiapkan platform suplai obat dan alat kesehatan. Lalu, koordinasi tingkat nasional untuk merespons potensi pandemi.

Menurut Guru Besar FKUI Menaldi Rasmin, pandemi Covid-19 jadi momentum meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kesehatan. Selain memperkaya keilmuan dan riset, memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan masalah kesehatan juga penting.

Ia mencontohkan, teknologi nano sudah berkembang selama 20 tahun terakhir, tetapi belum dimanfaatkan. Padahal, teknologinano dipercaya dapat membantu pengobatan kanker

dan penyakit infeksi, seperti tuberkulosis. Transplantasi paru juga diperkirakan bisa segera dilakukan. Hal ini membutuhkan banyak ahli dari berbagai cabang ilmu. Itu sebabnya, ia mendorong tenaga medis bersiap dengan kemajuan medis. "Kode etik kedokteran dan regulasi juga mesti dipahami. Kewajiban selanjutnya bagi kita ialah memberikan apa yang dibutuhkan pasien, menghargai kemampuan dan kompetensi rekan sejawat. Kita juga perlu mematangkan diri, menambah keterampilan, keilmuan, dan kompetensi," ucap Menaldi. Direktur Utama RSUP Persahabatan Agus Dwi Susanto menambahkan, pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien kini kian penting. Perkembangan ilmu pulmonologi dan kedokteran respirasi pun menjadi penting. Perkembangan ilmu kedokteran dapat diselaraskan dengan perkembangan teknologi. (SKA)Kompas_07_02_22_h.4_suka_duka

CATATAN AWAL PEKAN

Suka Duka Pindah
ke Ibu Kota Baru

Tahun 2015, Presiden Mesir Abdel Fatah el-Sisi mengumumkan akan memindahkan ibu kota ke tempat baru. Namanya masih Ibu Kota Pemerintahan Baru, terletak sekitar 50 kilometer dari ibu kota saat ini, Kairo. Seharusnya, awal tahun 2021, ibu kota baru Mesir mulai beroperasi. Rencana ini ditunda akibat pandemi Covid-19. Ibu Kota Pemerintahan Baru Mesir berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Laman Al Jazeera mengungkapkan, kota ini digadang-gadang sebagai kota modern dan dirancang bisa menampung 6,5 juta penduduk di area seluas 697,9 kilometer persegi. Pembangunan dilaksanakan oleh Otoritas Teknik Angkatan Bersenjata Mesir. Ini yang memicu polemik. Kubu oposisi menuding megaprojek ini ajang korupsi dan pamer kekuasaan Presiden Sisi. Dana pembangunan mencapai 60 miliar dollar AS atau sekitar Rp 863 triliun. Di Asia Tenggara, Myanmar dan Malaysia juga memindahkan ibu kota masing-masing. Artikel "A Short History of Relocating Capitals in Asia" yang dilansir laman Nikkei (30/8/2019) menyebutkan, tahun 2001 junta militer Myanmar memutuskan merelokasi ibu kota dari pesisir di Yangon ke wilayah pedalaman di Naypyidaw. Pembangunan selesai tahun 2006 dan semua kantor pemerintah beroperasi pada tahun berikutnya. Namun, banyak pegawai pemerintah tetap meninggalkan keluarga mereka di Yangon karena minimnya fasilitas komersial dan pendidikan di Naypyidaw. Sebelumnya, Malaysia memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya tahun 2003. Jaraknya hanya 25 kilometer. Semua badan pemerintah, termasuk kantor dan kediaman perdana menteri, kini di Putrajaya. Dari waktu ke waktu, banyak negara memindahkan ibu kotanya dengan beragam alasan. The Economist dalam artikel "Why Do Countries Move Their Capital Cities?" (24/1/2022) menyebutkan, secara historis pemerintah menggunakan ibu kota baru untuk menyatukan aneka perbedaan. Presiden AS George Washington memilih Washington DC tahun 1790 sebagai jembatan antara negara bagian di utara dan selatan. Australia memilih Canberra pada awal abad ke-20 untuk menengahi persaingan Sydney dan Melbourne. Brasil mencoba melakukan hal serupa saat memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia tahun 1960. Kota baru itu diharapkan bisa menciptakan masyarakat egaliter tanpa favela atau kawasan kumuh ilegal dan membawa pemerataan kesejahteraan. Sayangnya, seiring waktu, pertumbuhan demografi Brasilia sama saja dengan kota-kota lain di Brasil. Saat ini Brasilia malah disebut sebagai salah satu kota paling timpang di dunia. Ibu kota baru juga dianggap mencerminkan sebuah "kemajuan", terutama dari segi tampilan fisik. Di sejumlah ibu kota baru, gedung-gedung megah dengan arsitektur modern mendominasi panorama. Tata kota dirancang agar tak hanya fungsional, tetapi juga indah dipandang. Persoalan lingkungan ibu kota lama diharapkan tak terjadi di ibu kota baru, misalnya banjir, kemacetan lalu lintas, atau penduduk padat. Kini, menyusul para tetangganya, Filipina mengincar area urban baru yang disebut New Clark City sebagai alternatif

lokasi pusat pemerintahan dan bisnis. Berjarak sekitar 100 kilometer dari Manila, lokasi itu diharapkan jadi kawasan pertumbuhan baru sekaligus pemerataan penduduk dan kesejahteraan. Manila sekarang begitu padat. Kantor-kantor pemerintah tersebar di kawasan Metro Manila dan perlu satu jam lebih perjalanan dari satu kantor ke kantor lain. Filipina punya pengalaman memindahkan ibu kota sebelumnya. Quezon City menjadi ibu kota tahun 1948 sampai Presiden Ferdinand Marcos memindahkannya ke Manila tahun 1976. Banyak pihak di Filipina skeptis dengan rencana Presiden Rodrigo Duterte memindahkan ibu kota lagi dan menganggapnya "white elephant". Mahal, tapi tak berguna. Pembangunan ibu kota baru perlu waktu panjang dan perencanaan matang. Kalau tidak, nasibnya bisa seperti Washington DC, misalnya. Sejak dibangun tahun 1790, kota itu dicela sampai sekarang karena perencanaan kurang baik. Atau seperti Ngerulmud, ibu kota baru Palau, negara kecil bagian dari Federasi Negara-negara Mikronesia yang terletak di timur laut Indonesia. Laporan The Wall Street Journal tahun 2013 menyebutkan, gedung-gedung di ibu kota baru tidak cocok dengan iklim setempat. Kesalahan pada sistem ventilasi mengakibatkan serangan jamur. Pada akhirnya, Ngerulmud menjadi ibu kota dengan penduduk paling sedikit di dunia, 271 orang. (FRANSISCA ROMANA NINIK)

Kompas_07_02_22_h.4_dari_ukraina

Dari Ukraina, Asia Menebak AS

Langkah-langkah AS dalam konflik di Ukraina menimbulkan ambiguitas dan keraguan: apakah AS serius membela kepentingan Ukraina? Situasi di Ukraina bisa menjadi cermin Asia untuk membaca langkah AS.

Kris Mada

Terpisah ribuan kilometer,

Ukraina

dan Asia

sama-sama sedang memantau manuver Amerika Serikat. Keraguan dan kebingungan pada komitmen Washington menjadi salah satu alasan pemantauan itu.

Wajar Kiev bingung dan ragu dengan Washington dan sekutunya. Keraguan dan kebingungan Kiev, antara lain, disebabkan oleh fakta bahwa lamaran Ukraina untuk menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) sejak 2008 tidak kunjung diterima. Sampai sekarang, NATO tidak kunjung menerbitkan rencana aksi keanggotaan (MAP) untuk Ukraina. Penerbitan MAP merupakan tahapan sebelum suatu negara menjadi anggota NATO. Sebagai pembanding, Albania dan Kroasia mendaftar pada 2003 dan diterima pada 2009. Sebelum itu, tujuh negara Eropa Timur mendaftar pada 1999 dan diterima pada 2004.

Presiden AS Joe Biden pun menunjukkan sikap tidak kalah membingungkan. Berkali-kali ia memastikan tidak akan mengirim tentara ke Ukraina. Padahal, ada 180 perwira dan bintara AS di Ukraina.

Selain mengirim pelatih dan penasihat, Washington mengucurkan 2,5 miliar dollar AS sejak 2014 untuk Kiev. Selain un-

tuk membeli senjata, dana itu untuk membiayai pelatihan militer. Pada akhir Desember 2021, AS mempertahankan gugus tempur laut USS Harry S Truman di Laut Tengah. Padahal, gugus tempur itu dijadwalkan bergerak di Timur Tengah.

Selain itu, Rabu (2/2/2022) malam, Biden mengesahkan pengiriman 1.700 tentara ke Polandia dan 300 tentara lagi ke Jerman. Biden juga memerintahkan 1.000 tentara AS di Jerman dipindahkan ke Romania.

"Pengerahan ini bukti nyata bahwa kami, Rusia, patut khawatir. AS sebenarnya pihak yang terus meningkatkan ketegangan di Eropa," kata Juru Bicara Kepresidenan Rusia Dmitry Peskov menanggapi pengerahan 3.000 tentara AS itu. Kini, secara resmi, 8.100 tentara AS berada di dua negara yang berbatasan langsung dengan Ukraina. AS juga punya hampir 34.000 tentara di Jerman. Di Estonia dan Latvia, yang berbatasan dengan Rusia, juga ada tentara AS.

Selain mengerahkan tentara, AS juga menjalankan mesin diplomasi untuk menangani Ukraina. Direktur CIA William Burn bertandang ke Rusia dan Ukraina. Adapun Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan bolak-balik ke Eropa. Di luar itu, Biden dan bawahannya menelepon ke sana sini gara-gara Ukraina.

Kepentingan

Meski demikian, sejumlah pihak di luar Ukraina meragukan komitmen penuh Washington pada Kiev. Ketua Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev mengingatkan, Ukraina bisa bernasib seperti Afghanistan jika mengandalkan AS.

Mantan pentolan mata-mata Rusia dan teman sekampung Presiden Rusia Vladimir Putin itu mengatakan, AS meninggalkan Afghanistan begitu saja setelah tidak melihat ada kepentingan dengan negara itu. Peneliti hubungan internasional pada Universitas Oxford, Scott Singer, menyebut kepentingan AS terhadap Ukraina sangat rendah. Tidak ada komoditas strategis yang dibutuhkan AS dari Ukraina. Kiev tidak termasuk 10 besar mitra dagang AS. Selain itu, seperti bolak-balik diungkap Biden dan jajarannya, kepentingan strategis AS masa kini ada di Indo-Pasifik. Sebaliknya, Asia terus berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang makin besar. AS

sangat tergantung pada pasokan semikonduktor dari Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Krisis semikonduktor setahun terakhir membuktikan itu.

Inflasi di AS juga menunjukkan, Washington tidak bisa mengabaikan rantai pasok dari Asia. Selama bertahun-tahun, konsumen AS menikmati aneka produk murah karena kebutuhan mereka diproduksi di Asia. Karena itu, mantan Asisten Menteri Pertahanan AS Elbridge A Colby mengingatkan negaranya untuk tetap fokus pada Asia. Ia tidak menampik, ketegangan dengan Rusia bisa membuat perhatian AS teralih dari China. "Asia jauh lebih penting dan China lebih besar daripada Rusia. Kita tidak punya kemampuan militer dan diplomasi untuk terus bertahan di Eropa sembari berusaha fokus di Asia," tuturnya.

Anggota DPR AS, Rohit Khanna, mengatakan, AS tidak sanggup menanggung beban terlibat konflik di Ukraina kala China sedang bangkit. "Kepentingan keamanan nasional AS membuat kita tidak boleh terlibat dalam konflik yang bisa melemahkan kemampuan berhadapan dengan China," kata politisi Demokrat itu.

Seperti Singer dan Colby, Khanna sepakat bahwa bagi AS, Asia lebih penting daripada Ukraina. Hanya masalahnya, AS tidak kunjung menunjukkan keseriusan pada Indo-Pasifik. Akademisi India, Brahma Chellaney, mengkritik Biden yang begitu risau pada pengerahan ratusan ribu tentara Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Di sisi lain, Biden tidak terlihat gelisah pada pengerahan persenjataan dan tentara China di dekat perbatasan India.

Sementara di Asia Tenggara, pertemuan Biden dengan para kepala pemerintahan ASEAN dimundurkan dari Januari menjadi April-Mei 2022. Alasan resminya, karena kasus Covid-19 kembali naik.

Sementara sejumlah pihak menyebut, AS tidak kunjung memberikan tawaran konkret. Koordinator Indo-Pasifik di Gedung Putih Kurt Campbell mengakui bahwa AS perlu menawarkan kerangka kerja sama ekonomi bagi Indo-Pasifik. "Sudah jelas bahwa hubungan tidak hanya secara diplomatik, militer, strategis. Perlu hubungan komersial, investasi di Indo-Pasifik," ujarnya.

Gedung Putih juga tidak kunjung menghadirkan tawaran ekonomi yang nyata untuk In-

do-Pasifik. Padahal, Washington juga tahu, AS perlu memberikan tawaran ekonomi untuk menandingi China di Asia. Blinken pernah mengumumkan pada triwulan III 2021 bahwa AS sedang menyusun kerangka kerja ekonomi untuk ditawarkan ke Indo-Pasifik pada awal 2022. Sampai sekarang, belum ada yang benar-benar tahu wujud kerangka itu.

Salah paham

Evan A Laksmana dari Lee Kuan Yew School of Public Policy dan Hoang Thi Ha dari ISEAS-Yusof Ishak Institute sepakat, AS masih salah paham dan salah langkah di Asia Tenggara. Menurut Evan, AS memakai asumsi kuno yang menggunakan perspektif masalah Eropa untuk melihat Asia. AS harus berhenti memakai perspektif itu dan mulai mencari tahu versi Asia.

Washington juga terlalu fokus pada Beijing dan mengajak negara-negara kawasan memusuhi China. "Perilaku China memang membahayakan kawasan. Walakin, AS juga harus mengakui, perannya mengacaukan tatanan kawasan," kata Evan.

Seperti Evan, Hoa juga mengingatkan bahwa kawasan senantiasa mencatat AS selalu menempatkan

kepentingan sendiri di atas hukum dan lembaga internasional. Washington dan sekutunya membuat tafsiran sendiri atas aneka hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982. AS dianggap tidak punya landasan membahas ketertiban di laut berdasarkan UNCLOS. Sebab, Washington tidak kunjung mengakui dan meratifikasi UNCLOS 1982.

Narasi politik AS, menurut Evan dan Hoang, tak akan diterima kawasan. Narasi demokrasi versus otoritarianisme atau ketertiban berbasis hukum, yang kerap digemakan AS, bukan menjadi perhatian kawasan. Dalam jajak pendapat ISEAS-Yusof Ishak Institute selalu konsisten ditemukan, Asia Tenggara percaya pada AS bukan karena kesamaan budaya politik. Mereka mau berkomunikasi dengan AS karena alasan ekonomi. (AFP/REUTERS)